

SATGAS REDDplus

Persoalan Visi dan Demokrasi



KOMPAS/ICHWAN SUSANTO

Menyusuri keindahan hutan hujan tropis di sepanjang Sungai Sekonyer merupakan suguhan tersendiri bagi pengunjung Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Keragaman hayati, keindahan alam, serta udara segar dan sehat merupakan imbalan atas dipertahankannya hutan.

Brigitta Isworo Laksmi

Menjelang selesai fase kedua program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan alias REDD+ akhir tahun ini, lembaga khusus REDD+ belum terbentuk. Padahal, menurut nota kesepakatan antara Indonesia dan Norwegia yang ditandatangani 26 Mei 2010, target fase kedua, terbentuk badan khusus REDD+, penyelesaian proyek percontohan yang sudah tercapai, serta penetapan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi.

Pada 22 Januari 2013, terbit Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 25 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). Sesuai keppres itu, Satgas REDD+ meneruskan tugas sampai terbentuk lembaga REDD+, paling lambat 30 Juni 2013. Provinsi percontohan REDD+ adalah Kalimantan Tengah.

Ditemui di kantor Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), di Jakarta, Kepala UKP4 yang ditunjuk sebagai Ketua Satgas Kelembagaan REDD+ Kuntoro Mangkusubroto bertutur panjang tentang persoalan yang dihadapi saat ini dan masa depan REDD+ pascapemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Kuntoro, lembaga REDD+ harus mempunyai kekuatan, memiliki otoritas untuk mengkaji ulang kebijakan, memberi rekomendasi kebijakan, mengubah kebijakan, serta menegakkan hukum. "Tugas-tugas seperti ini tak bisa diserahkan kepada birokrat yang bekerja secara linier," ujar Kuntoro.

Bicara tentang hutan akan terkait dengan sejumlah lembaga yang memiliki visi, misi, dan konsepsi sendiri dengan peraturan yang kadang saling bertolak belakang. "Undang-undang tentang hutan, misalnya, mengatakan, Kementerian Kehutanan yang berwenang dan ada definisi mereka sendiri mengenai hutan. Butuh terobosan pada level pengambilan keputusan politik tinggi," katanya.

Saat ini, pembentukan lembaga REDD+ sampai tahap pemrosesan secara birokrasi untuk menyusun lembaga baru. Tahap ini melibatkan Kementerian PAN, Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan.

Kesulitan lain adalah menyampaikan konsepsi tentang emisi, tentang karbon ke lembaga-lembaga itu. "Emisi itu apa, karbon itu apa? Apa hubungan karbon dengan gambut, bagaimana karbon dihargai? Tidak bicara lagi potong pohon dapat revenue. Kita bicara jaga hutan dapat karbon baru dapat revenue," ujarnya.

Tak hanya emisi

Konsepsi REDD+ tak hanya terkait karbon. Nilai plus di luar karbon bermacam-macam. Yang dihadapi ialah sulitnya menjelaskan REDD+ kepada menteri-menteri terkait dan bawahannya.

Inti REDD+ adalah menekan emisi gas rumah kaca, salah satunya gas karbon. Dia tak berpegang semata pada kesepakatan Kerangka Kerja Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) yang menjadikan karbon sebagai komoditas. "Tema saya selalu beyond carbon," ujarnya.

Banyak nilai tambah di luar karbon. "Ada keragaman hayati, pemanfaatan tanah kritis, dan sebagainya," kata Kuntoro.

Dengan REDD+, alternatif bagi penghidupan masyarakat setempat terbuka. Membiarkan masyarakat adat hidup tanpa memiliki pilihan lain, menurut Kuntoro, salah secara sosiologis. Selama ini, konsesi untuk perusahaan kelapa sawit, misalnya, tidak mengangkat warga setempat dari kemiskinan.

Di sisi lain, dia mengakui, "REDD+ adalah barang baru. Soal izin misalnya, apa syaratnya, masih kita pelajari."

Persoalan pendanaan belum juga terpecahkan. "Kementerian Keuangan harus terlibat. Bagaimana mekanisme pendanaan dari badan itu. Bagaimana warga mendapat uang langsung lewat sistem perbankan?" ujarnya.

Dia menolak pendanaan dari APBN yang amat terstruktur sehingga menghilangkan dimensi sosial dan manusia. "Begitu masuk APBN, seluruh kemerdekaan mereka akan hilang karena harus mengikuti berbagai ketentuan yang tidak bisa mereka lakukan," katanya.

Kuntoro saat ini belum memikirkan soal perdagangan karbon. "Saya tidak mau membebani otak saya," katanya. Di samping dari Norwegia, dana untuk REDD+ dari Australia dan negara lain. Pemilik karbon juga belum jelas, apakah pengusaha swasta atau masyarakat adat. "Pendekatan saya ekstrem, hutan punya masyarakat adat. Kalau diuangkan, uangnya ke rakyat semua," katanya.

Dalam program REDD+, ada tiga pihak terlibat, yaitu pemerintah, swasta, masyarakat lokal, dan masyarakat sipil. Perusahaan PT Rimba Makmur Utama kini terlibat dalam percontohan REDD+ di Kalteng, Satgas REDD+ membentuk Sekolah Sahabat Bumi, melibatkan guru-guru dan masyarakat lokal.

Masalah demokrasi

Kuntoro optimistis untuk menyelesaikan tugas membentuk lembaga REDD+. "Saya harus optimistis. Pertanyaannya, kalau ini terbentuk seberapa derajat desain yang kita siapkan di awal diterima?" katanya.

Dia berharap presiden baru sejalan dengan kebijakan itu. "Kalau dibilang bubar, ya sudah. Setidaknya setahun ini kita menata program. Meski ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan RPJM untuk jangka menengah, program pembangunan tidak dijamin langgeng. Bupati saja bisa menyatakan tidak pada RPJMD (daerah) bupati lama. Rupanya masih ada persoalan dalam menerjemahkan demokrasi kita ke tata pemerintahan yang baik," ujarnya menutup pembicaraan.